

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak tantangan untuk memberikan akses pelayanan publik yang adil dan efektif. Namun, sistem pemerintah elektronik tampaknya dapat mengatasi masalah ini dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia.¹ Digitalisasi adalah kemajuan besar dalam industri TI dan komunikasi yang memiliki peran penting dalam membantu orang menyelesaikan masalah mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terdorong untuk meningkatkan layanan publiknya dengan membangun sistem pemerintahan yang berbasis TI untuk membantu orang dalam berbagai hal.²

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Pasal 1, ayat 1, layanan *e-government* (SPBE) didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan layanan *e-government* juga dianggap sebagai transformasi sistem kerja pemerintahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi atau digital atau online.³

Dengan adanya transparansi pemerintahan dalam pelayanan publik, perbaikan ini didorong oleh hubungan instrumentalisasi *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *good governance* sebagai tolok ukur

¹ Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3 (1). hal. 72

² Adu, A. L., Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintah Daerah. *JIKO : Jurnal Informatika dan Komputer*, 5 (3). hal. 216

³ Amri, U., Adianto., & Hasim As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2). hal. 12202

yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang menghasilkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah.⁴

Provinsi Aceh kemudian menindak lanjuti Peraturan Presiden tersebut. Provinsi Aceh menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong. Selanjutnya diikuti Pemerintah Aceh Tamiang menerapkan pengembangan *e-government* dengan pelaksanaan SPBE pada proses kerjanya dengan keputusan bupati aceh tamiang No. 45/412 tahun 2023 tentang Pembentukan tim pelaksana dan sekretariat kegiatan sistem informasi gampong (SIGAP).

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan upaya untuk mewujudkan implementasi *e-government* dalam beberapa tahun terakhir. bertujuan mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau.⁵ Upaya untuk membuat pemerintahan beroperasi secara elektronik dikenal sebagai kebijakan *e-government*. Munculnya dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) telah membawa perubahan besar.⁶

Pemerintah Aceh meluncurkan aplikasi berbasis *web* yang disebut Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh sebagai upaya untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴Rusdy, I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah Untuk Mengujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5 (2). hal. 220

⁵ Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 4 (2). hal. 51

⁶ Sadat, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. *Buletin Utama Teknik*, 14 (3). hal. 200



Gambar 1.1 Portal Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Melalui penerapan sistem informasi gampong sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam membangun sistem informasi yang terintegrasi, dari Gampong, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi melalui Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT).

Kecamatan Tamiang Hulu merupakan salah satu yang berada di kabupaten Aceh Tamiang yang ikut andil dalam penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Banyak desa di Aceh yang masih menyimpan data atau mengarsipkan dokumen secara manual, sehingga penyimpanan dan pengelolaan data di desa-desa tersebut tidak efektif.⁷ Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP), yang berbasis *web* ini, telah dirilis untuk menjadikan proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan lebih mudah.

⁷ Hanifa, D., Mumtazah, Shinta, N., & Taufik. (2024). Penerapan Sistem Informasi Gampong (Sigap) pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 4 (1). hal. 52



Gambar 1.2 Informasi Gampong dan Kependudukan SIGAP Tahun 2024

Warga gampong pastinya ingin mengetahui informasi tentang tempat mereka tinggal atau akan tinggal, jadi dengan adanya aplikasi SIGAP, setiap orang yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah dan cepat mengaksesnya. Dengan demikian, kebutuhan informasi dapat dipenuhi kapan saja dan di mana saja.⁸

Pada dasarnya Implementasi SPBE di Kantor Camat Tamiang Hulu sudah berjalan dengan baik hanya saja terdapat kendala kurang *update* nya informasi pada portal pelayanan, dampak dari kurang *update* nya portal pelayanan ialah minimnya informasi yang diterima masyarakat, dan kurang optimalnya pelayanan berbasis SPBE yang diterima masyarakat.

Hal itu di buktikan dengan mendapatkan predikat hanya BAIK dengan Indeks 2,62 pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.⁹

⁸ Munawir & Erdiwansyah. (2018). Perancangan Portal Informasi Gampong Pada Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar. Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi, 1 (2). hal. 75

⁹ MenpanRB, P. (2022). Hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Nomor 108.

Tabel 1.1 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Aceh	2,76	Baik
2.	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,29	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,63	Baik
4.	Pemerintah Kab. Bireuen	2,10	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,62	Baik
6.	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,20	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,60	Baik
8.	Pemerintah Kota Sabang	1,59	Kurang
9.	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,15	Baik
10.	Pemerintah Kota Langsa	1,82	Cukup
11.	Pemerintah Kota Subusalam	1,76	Kurang

Sumber : Kementerian ESDM (Indeks SPBE Kepmen Nomor 108 Tahun 2023)

Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.¹⁰ Walaupun indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan predikat BAIK dengan indeks 2,62 pada penilaian tahun 2022, penilaian tersebut masih jauh dari target dan belum sesuai harapan, baik pada aspek domain kebijakan, domain tata kelola dan domain layanan SPBE terkhususnya pada Pemerintahan Daerah terutama di Kecamatan Tamiang Hulu.

Kendala lain yang terjadi di lapangan ialah kesulitan pengaksesan jaringan (*Signal*) dikarenakan kurangnya faktor pendukung seperti kurangnya Tower *Signal* di sebagian daerah di Kecamatan Tamiang Hulu sehingga masyarakat mengalami kendala dalam mengakses web server pada pelayanan SPBE. Bahkan pihak Dinas

¹⁰ MenpanRB, P. (2021). No Title. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sembilan-instansi-pemerintah-raih-predikat-sangat-baik-evaluasi-spbe-2021>.

Komunikasi dan Informatika tidak melakukan pengecekan penggunaan *e-government website* pelayanan di daerah Pemerintahan Kecamatan Tamiang Hulu.

Berbagai persoalan yang muncul tersebut adalah sebagai akibat dari kurang optimalnya pengawasan *website* pelayanan berbasis elektronik. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terkhususnya Pemerintahan Kecamatan Tamiang Hulu dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait sistem penghubung layanan pemerintah berbasis elektronik.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Camat Tamiang Hulu.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam Penelitian "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Camat":

1. Bagaimana tingkat kesiapan Kantor Camat dalam mengadopsi dan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)?
2. Apa saja manfaat yang diperoleh dari implementasi SPBE di Kantor Camat, baik dalam hal efisiensi administrasi maupun peningkatan pelayanan publik?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi SPBE di Kantor Camat?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses implementasi SPBE di Kantor Camat, dan bagaimana hal itu mempengaruhi efektivitas sistem?
5. Apakah terdapat perbedaan hasil kinerja pemerintahan sebelum dan setelah diterapkannya SPBE di Kantor Camat?

1.3 Batasan Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik yang tertera dalam paragraf 7 Sistem Penghubung

Layanan Pemerintah Pasal 33 yaitu penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi SPBE di Kantor Camat dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Analisis kebijakan terkait implementasi SPBE di Kantor Camat.
2. Identifikasi kendala dan tantangan yang muncul selama implementasi SPBE di Kantor Camat.
3. Evaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik setelah penerapan SPBE di Kantor Camat.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi SPBE yang sedang berlangsung di Kantor Camat.
2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi SPBE di Kantor Camat.
3. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik setelah penerapan SPBE di Kantor Camat.
4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam implementasi SPBE di Kantor Camat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang manfaat yang diharapkan dalam hasil penelitian ini adalah :

- Bagi Penulis, Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis melalui karya ilmiah, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama menjalani perkuliahan di FISIP UISU Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- Manfaat Praktisi dan Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berupa saran atau masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) dalam hal ini menyangkut inisiatif individual, integrasi, kontrol, toleransi terhadap konflik, pola-pola komunikasi, toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, dukungan dari manajemen, identitas dan sistem imbalan guna meningkatkan pelayanan publik yang handal, tanggap, empati serta adanya jaminan kepada masyarakat.

- Bagi Akademis, Melalui penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan teoritis dan konseptual tentang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pertimbangan dan pemikiran bagi peneliti lain yang berminat dalam masalah yang penulis teliti.

BAB 2

URAIAN TEORITIS

2.1 Literatur Penelitian

Bagian ini mencakup ringkasan literatur yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi adalah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Ini berarti bahwa berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan atau program.

Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹

Menurut Purwanto (2012), implementasi berarti mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran dalam upaya mewujudkan kebijakan.¹² Membentuk hubungan (*linkage*) yang memudahkan tujuan kebijakan dapat direalisasikan melalui tindakan pemerintah disebut implementasi, menurut Grindle 1980, Salah satu tugas implementasi adalah membangun "sistem pengiriman undang-undang" di mana sarana tertentu dirancang dan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹³ Dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Setiawan 2004, mengatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses

¹¹ Adzani, I. A., Azizah, K. N., Adiwinata, N. J., Dan Marthania, W. 2024. Implementasi Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Sekolah Dasar : Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Dan Keterlibatan Siswa. *Jpbb : Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*. 3(1). hal. 108

¹² Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media.

¹³ Grindle & Merilee. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*, Prinnton University Press. New Jersey. hal. 6

interaksi antara tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Untuk mencapai hal ini, jaringan pelaksana yang efektif diperlukan.¹⁴

Implementasi yaitu implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam proses-proses yang berupa berbagai tindakan dari aktor-aktor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan aktivitas pencapaian tujuan sehingga mencapai hasil kegiatan.¹⁵

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna.¹⁶

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah proses usaha pelaksanaan yang dijalankan oleh suatu kelompok sasaran pemerintah yang memiliki otoritas dan ditetapkan oleh undang-undang dalam melaksanakan birokrasi yang efektif dan mewujudkan kebijakan.

2.1.2 Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) adalah suatu sistem informasi yang mengembangkan pengelolaan data dan informasi di Gampong.¹⁷ Dalam pengertian lain juga Sistem Informasi Gampong (SIGAP) adalah aplikasi berbasis web yang diluncurkan oleh Pemerintah Aceh. Aplikasi berbasis web ini dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi,

¹⁴ Setiawan, & Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Bandung: Remaja Rosdakarya. hal. 39

¹⁵ Nasution, M. I., Dan Nurwani. 2021. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. 9(2). hal. 111.

¹⁶ Anisa, A. F. Y., & Attamimi, N. 2023. Implementasi Media Flash Card Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada Anak Usia Dini. Ash-Shobiy: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Dan Al-Qur'An, Vol 2 No 2. hal. 118.

¹⁷ Haidi, M. L., Arbianti, S., & Aini, F. (2024). Transformasi Digital pada Pemerintahan Gampong Lampasi Engking melalui Aplikasi Sigap. Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, 4 (1). hal. 147

Informasi, dan Persandian Aceh.¹⁸ SIGAP bukan hanya sekadar aplikasi teknologi informasi, tetapi juga sebuah perangkat inovatif yang dirancang untuk memodernisasi tata kelola gampong, mempercepat alur administratif, dan meningkatkan transparansi.¹⁹

Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) ini dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh melalui dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Pengembangan aplikasi ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam membangun sistem informasi yang terintegrasi, dari Gampong, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi melalui Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT).

Aplikasi ini dapat diperoleh oleh Gampong/Kampung/Desa tanpa beban biaya apapun, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh melalui Camat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten/Kota, atau nama lainnya.

2.1.3 Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah sistem yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau wilayahnya. Pemerintah juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang secara bertanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuatan. Pemerintah juga bias diartikan sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu negara atau penguasa.

¹⁸ Hanifa, D., Mumtazah, Shinta, N., & Taufik. (2024). Penerapan Sistem Informasi Gampong (Sigap) pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 4 (1). hal. 51

¹⁹ Kurniawan, A., Fairus., Mastuti., R., Fuad, M., Sari, R. P., & Chairuddin. (2024). Dari Tradisi KeTeknologi : Pelatihan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Mengubah Dinamika Administrasi di Gampong Aceh. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7 (3). hal. 956

Pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pelayanan publik, dan setiap individu yang melakukan hubungan pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pelayanan sipil, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan perintah.²⁰

Definisi pemerintah diidentifikasi dalam beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan berikut ini :²¹

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara, seperti diatur dalam UU (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.²²

Pemerintah, menurut Miriam Budiarjo 2013, adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, yang berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduknya, dan wilayahnya, dan bertujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara.²³

²⁰ Ndraha, T. (2003). *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta.

²¹ Alvionita, F., & Ledyawati. 2023. Strategi Pemerintah Dalam Penurunan Stunting (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Idea*. 2(1). hal. 49-50

²² Permana, D. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21 (2). hal. 158

²³ Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

2.1.4 Pengertian Kebijakan

Pada umumnya, kebijakan didefinisikan sebagai tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya, baik dalam bentuk pengaturan maupun keputusan. Pemegang otoritas publik membuat keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada skala strategis atau garis besar yang dikenal sebagai kebijakan publik.

Menurut Friedrich 2007, kebijakan adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan, yaitu hambatan tertentu yang menghalangi peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.²⁴ Lubis 2007, menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu mencari peluang–peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.²⁵

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah langkah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pemerintah dengan adanya hambatan atau permasalahan dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan sasaran yang di inginkan.

2.1.5 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan yang luas dan strategis, tidak spesifik dan sempit, menurut Abidin 2012, Akibatnya, kebijakan publik berfungsi sebagai standar umum untuk kebijakan dan keputusan khusus yang dibuat di bawahnya.²⁶

Tachjan Dalam Rahayu 2016, menyatakan bahwa kebijakan memiliki tujuan untuk memperoleh nilai-nilai publik, baik yang berkaitan dengan manfaat publik maupun nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh

²⁴ Friedrich. (2007). *Kebijakan Publik*, Bandung.: Mandar Maju. hal. 20

²⁵ Lubis & Solly. (2007). *Kebijakan Publik*, Bandung : Mandar Maju. hal. 9

²⁶ Abidin & Said, Z. (2012). *Kebijakan Publik*, Jakarta : Salemba Humanika. hal. 31

publik untuk ditingkatkan.²⁷ Menurut Dunn 2003, kebijakan publik adalah suatu rangkaian keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah di bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, dan ekonomi umum.²⁸

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam konteks ini tindakan pemerintah untuk tidak merespons permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik) dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.²⁹

Kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pertimbangan etis, dan nilai-nilai masyarakat. Adapun tujuan utama dari kebijakan publik adalah menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat dengan memecahkan masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kualitas hidup warga negara.³⁰

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.³¹

²⁷ Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : AIPI BANDUNG. hal. 19

²⁸ Dunn & William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gajahmuda University Press. hal. 106

²⁹ Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik. 1(3). hal.17

³⁰ Priyonggo, S., Nugroho, L., & Zulfahmi. 2024. Kajian Kebijakan Publik Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Saat ini (Perspektif Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan). Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 2 (1). hal. 279

³¹ Gulo, T. R., Mendrofa, R., & Elazhari. 2024. Implementasi Kebijakan Publik Serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini. Journal Genta Mulia. 15(1). hal. 289

Pengertian kebijakan publik adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dibangun oleh para pejabat dan badan-badan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama, kebijakan publik selalu memiliki tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang berisi tindakan pemerintah adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.³²

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam konteks ini tindakan pemerintah untuk tidak merespons permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik) dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.³³

Makna kebijakan pada dasarnya menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sehingga pengertian kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan dapat dikatakan sebagai landasan dasar dari berbagai pemecahan masalah yang dihadapi oleh publik, hal ini tentunya berkaitan dengan permasalahan publik sehingga membutuhkan berbagai kebijakan yang ada, artinya kebijakan dapat dijadikan acuan formal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi publik itu sendiri.³⁴

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan-kepentingan dan tindakan yang mempunyai mencapai tujuan kehidupan masyarakat.

³²Hafidati, P. 2020. kebijakan publik terhadap pendidikan di indonesia pada masa pemerintahan orde reformasi. jurnal magister ilmu hukum. 5(1) hal. 67

³³ Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik. 1(3). hal.17

³⁴ Laponte, Y., Nurhannis, & Alamsyah, N. 2024. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi.1(2). hal. 214

2.1.6 Model Implementasi Kebijakan

Dalam kebijakan publik, implementasi adalah proses penting. Setelah kebijakan dibuat dan ditetapkan, mereka harus dilaksanakan. Model kebijakan diperlukan untuk menganalisis kebijakan. Ada beberapa model dalam proses implementasi kebijakan publik dalam Agustino 2016, diantaranya adalah model implementasi kebijakan Donald van Metter dan Carl van Metter, George C. Edward III, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Merilee S. Grindle.³⁵

a. Implementasi Kebijakan model Donald van Metter & Carl van Horn

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Carl van Horn (dalam Leo Agustino 2016:133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan-hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas

³⁵ Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. hal. 133-152

dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang berlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan suatu implementasi kebijakan publik

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri- ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (*agen*) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan adalah kebijakan dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model Implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141). Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

c. Implementasi Kebijakan Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Leo Agustino (2016:146-152) mengatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah (*Tractability*

of The Problem), karakteristik kebijakan atau undang-undang (*Ability to Structure Implementation*) dan variabel lingkungan (*Nonstatutory Variable Affecting Implementation*).

d. Implementasi kebijakan Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy*.

1. *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
- e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* terdapat 3 (tiga) poin yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

2.1.7 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE.³⁶

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan elektronik yang memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi.³⁷

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, "Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE." Pengguna SPBE termasuk pemerintah, masyarakat, dan bisnis.³⁸

Menurut definisi yang diberikan oleh Presiden, "penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE", SPBE pada dasarnya

³⁶ Rahmadi, A. N., Jibril, M., & A'yun, M. (2021). Implementasi E-government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19 (3). hal. 183

³⁷ Prameswari, A., Zakaria, S., & Centia, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Electronic Government Melalui Penerapan Aplikasi Mobile Paspur (M-PASPOR) Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 3 (2). hal. 257

³⁸ Birokrasi Reformasi, D. A. N. K. P. (2018). *Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah*, 2017.

merupakan e-government. Definisi ini setidaknya sejalan dengan definisi *e-government* yang diberikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *European Parliament*.³⁹

2.1.8 E-Government

E-governmenta adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance*.⁴⁰

Salah satu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dikenal sebagai *e-government*, yang berarti bekerja untuk menyediakan layanan publik. Pemerintahan yang baik dapat dinilai jika terdapat bukti bahwa pemerintahan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi melalui kebijakan dan tindakannya.⁴¹

E-Government adalah bentuk penerapan pelayanan yang bisa menaikkan mutu pelayanan public menggunakan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yg menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan berita yang tepat. E-Government dibutuhkan buat menaikkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan maksud supaya tumbuh peningkatan pengetahuan warga

³⁹ Rusdy, I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah Untuk Mengujudkan Good Governence. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5 (2). hal. 220

⁴⁰ Bahrudin, A., & Wahyuningsih, C. D. (2023). Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam Mewujudkan Smart City Di Dinas Kominfos Denpasar Bali. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 20 (1). hal. 279

⁴¹ Warman, N. S., Syamsir, Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya (Mateandrau)*, 1 (2). hal. 134

terhadap gambaran pelayanan pemerintah khususnya birokrasi/penyelenggaraan pemerintahan.⁴²

E-Government merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan proses kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien guna sebagai bentuk bertanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi tanpa harus datang ke instansi terkait.⁴³

Pada dasarnya e-government adalah penerapan produk – produk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan.⁴⁴

Untuk mencapai *good governance*, setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus memanfaatkan teknologi informasi. Konsep *good governance* memerlukan sistem yang dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien.⁴⁵

Good governance adalah pemerintah yang responsif dan profesional dalam menjalankan tugas pemerintahannya, khususnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakatnya.⁴⁶

⁴² Susanto, G., Hattab, S., dan Suasa. 2024. Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Tondo Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Research Student*. 1(5). hal.63

⁴³ Prasetya, K. S. P., dan Handayani, N. 2024. Efektifitas E-Government dan Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Performance Organisasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 13(3). hal.3

⁴⁴ Ruf, M., Sahlania, O., Ashariyana., & Mana, R. 2023. Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Laika di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Administrasita*. 14(01). hal. 25

⁴⁵ Sadat, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. *Buletin Utama Teknik*, 14 (3). hal. 200

⁴⁶ Lay, M. R. 2023. Strategi Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. 5(2). hal. 1544

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, pelaksanaan dalam pengembangan e Government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama, yaitu :⁴⁷

1. Menciptakan sistem jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang memiliki kualitas dan cakupan yang memuaskan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia, tanpa terbatas oleh waktu, dan biaya yang terjangkau untuk semua orang.
2. Membangun koneksi yang interaktif dengan dunia bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat kemampuan dalam menghadapi perubahan dan persaingan dalam perdagangan internasional.
3. Membentuk cara dan sarana untuk berkomunikasi dengan institusi negara dan menyediakan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan negara.
4. Membuat sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, sehingga transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan daerah dapat berjalan dengan lancar, serta memperbaiki kinerja pemerintah daerah otonom.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Camat Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang menjadi rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Diantara penelitian-penelitian tersebut, beberapa penelitian yang menjadi rujukan utama adalah sebagai berikut :

Sadat, A. (2019) dengan judul Implementasi Sistem informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada dinas kesehatan kabupaten Aceh Tenggara. Menggunakan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dengan memanfaatkan informan

⁴⁷ Algiffary, M. A., & Tata Sutabri, T. 2023. Analisis Tingkat Kualitas Layanan E-LAPKIN Menggunakan Metode E-SERQUAL Pada Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Restikom : Riset Teknik Informatika Dan Komputer. 5(1). hal. 23

kunci. Analisis data menggunakan kualitatif yang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan interviu atau wawancara kepada informan kunci. Hasil Penelitian terhadap Implementasi Simpeg pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara diukur dengan menggunakan dua dimensi yakni sumber daya manusia dan pelaksanaan prosedur. Implementasi Simpeg pada Dinas Kesehatan telah berjalan dengan baik tetapi masih perlu terus ditingkatkan dalam pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan IT dan Sumber daya tenaga ahlinya, hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dan observasi penelitian.

Rahmadi, A. N. *at. all* (2021), dengan Judul Implementasi *E-government* Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menganalisis dan mempelajari dokumen. Dimana dokumen yang akan dianalisis adalah dokumen kajian kepustakaan, berita dan Peraturan Presiden Republik No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Tata Kelola Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi *e-government* di Kota Probolinggo telah memenuhi layanan sistempemerintahan elektronik yang tercantum dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Tata Kelola Elektronik.⁴⁸

Hidayah, E. S. dan Almadani, M. (2022). Dengan judul Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan Studi Observasi yang memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Hasil dari penulisan menunjukkan tingkat kematangan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2.05 dengan predikat “Cukup”. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya yakni aspek audit TIK, dengan tiga indikator penilaiannya

⁴⁸ Rahmadi, A. N., Jibril, M., & A'yun, M. (2021). Implementasi E-government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19 (3).

(indikator 29 Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan indikator 31 pelaksanaan audit keamanan SPBE).⁴⁹

Warman, N. S. (2022). Dengan judul Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini baik berupa data primer dan juga data sekunder diperoleh dengan melalui teknik interview, pengamatan, dan dokumentasi serta selanjutnya dianalisis dan dibuat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Hasil studi ini adalah penerapan kebijakan inovasi dalam penyelenggaraan SPBE di kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan cukup baik, dapat dilihat dari terciptanya aplikasi layanan yang memudahkan masyarakat di Kota Pekanbaru. Adapun hambatan-hambatan yang ada yaitu, keterbatasan penyebaran sosialisasi mengenai aplikasi dan keterbatasan SDM yang memiliki keahlian teknis TIK.⁵⁰

Wahyuni, N. (2023). Dengan Judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi dengan analisis model interaktif sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki banyak layanan administrasi dan layanan publik yang berbentuk elektronik.⁵¹

Rusdy, I. R. dan Flambonita, S. (2023). Dengan judul Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah untuk Menghujutkan Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*),

⁴⁹ Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 4 (2).

⁵⁰ Warman, N. S., Syamsir, Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya (Mateandrau)*, 1 (2).

⁵¹ Wahyuni, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Musamus Journal of Public Administration*, 5 (2).

Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) dan Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*). Terselenggaranya *good governance* dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan nyata sehingga Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab karena masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah masih belum melaksanakan SPBE karena itu di masa mendatang perlu membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE agar SPBE dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebagaimana mestinya.⁵²

Shafira, A. dan Kurniasiwi, A. (2021). Dengan judul Implementasi *E-government* dalam upaya meningkatkan pelayanan berbasis online di kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, dengan Metode yang berasal dari dokumentasi yang dimana data diperoleh dari berbagai macam sumber literatur sebelumnya yaitu web resmi instansi dan jurnal-jurnal untuk keabsahan penelitian. Dengan hasil Implementasi *E-Government* di kabupaten kulon progo bisa dikatakan belum efektif karena Pemkab Kulon progo kurang dalam penggunaan aplikasi dibanding pemda-pemda lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun Dengan adanya pemeriksaan kinerja pendahuluan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi sehingga pelayanannya bisa tepat dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa tepat waktu dan akurat.⁵³

⁵² Rusdy, I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah Untuk Mengujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5 (2).

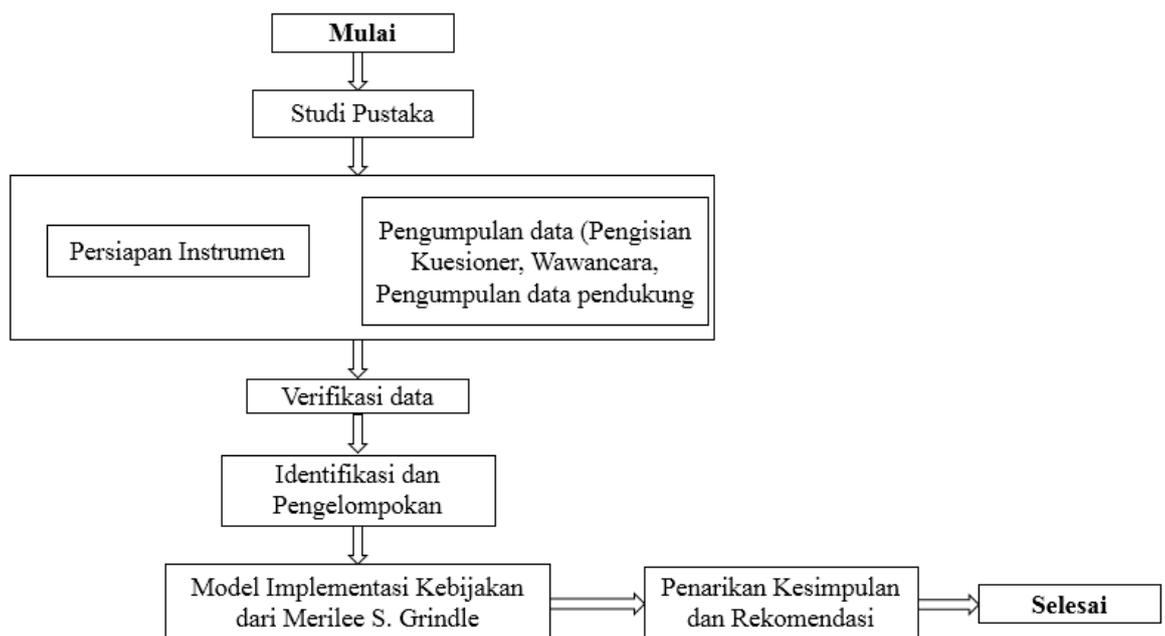
⁵³ Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Implementasi E-government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabu*, 5 (1).

Penjelasan penelitian yang telah dijelaskan diatas memiliki beberapa persamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama membahas mengenai Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu fokus penelitian dimana peneliti akan melihat Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2.3 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka Pemikiran dibuat untuk untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi dan menjadikan tersaji secara sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah dan terukur. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

Menurut model ini, implementasi SPBE harus dilakukan secara terencana, terarah, dan terukur. Pada tahap perencanaan, perlu dilakukan kajian dan analisis untuk menentukan arah dan tujuan implementasi SPBE, serta untuk membuat rencana aksi yang mencakup tahapan dan kegiatan yang akan dilakukan. Pada tahap

pelaksanaan, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memahami dan menerapkan SPBE, serta untuk memastikan bahwa SPBE berjalan sesuai dengan rencana.

Keberhasilan implementasi SPBE dipengaruhi oleh:

- a. kebijakan yang mendukung dan mendorong SPBE.
- b. manajemen yang memiliki komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam melaksanakan SPBE.
- c. Teknologi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan implementasi SPBE.
- d. Tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman dalam teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Pembiayaan yang memadai untuk mendukung implementasi SPBE.
- f. Masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi SPBE.

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran keberhasilan implementasi SPBE dapat dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle yang diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Di mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.